



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Batalkan Anggaran Shelter Warga Bukit Duri

Dinas diminta tak seenaknya mengalihkan anggaran ke program lain.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mencoret anggaran pembangunan *shelter* di Bukit Duri, Jakarta Selatan, senilai Rp 5,97 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Rumah sementara itu sedianya dibikin untuk warga Bukit Duri yang digusur karena program normalisasi Kali Ciliwung pada 2016.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat Meli Budiastuti, menuturkan anggaran tersebut terpaksa dihapus lantaran hingga sekarang tidak teresca lahannya. "Jadi, kami matikan anggarannya," tutur dia kepada *Tempo*, Jumat lalu.

Menurut Meli, timnya sudah menjalankan survei ke lokasi yang diusulkan oleh warga Bukit Duri di Setia-Ciliwung, sekitar 300 meter dari bibir Sungai Ciliwung. Namun Dinas tak bisa membeli lahan tersebut karena pemiliknya belum menawarkan lahan. Bukti kepemilikan lahan masih berupa girik sehingga perlu diteliti dulu sebelum dibeli. Apalagi, di Setia Ciliwung masih banyak bangunan beserta penghuninya.

Rencana pembangunan rumah sementara disampaikan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Dia menyatakan *shelter* untuk warga Bukit Duri diperlukan sampai pemerintah rampung membangun kampung susun. Dalam kampanye pemilihan gubernur 2017, Anies

bahkan menekan kontrak politik dengan warga Bukit Duri soal pembangunan kampung susun.

Pada 28 Mei lalu, Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Hakim menguak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan *class action* warga Bukit Duri pada 25 Oktober 2017 dan memutuskan pemerintah DKI, Balai Besar, dan BPN DKI membayar ganti rugi Rp 200 juta untuk tiap penggugul.

Sementara itu, Meli menyatakan belum bisa memastikan apakah anggaran *shelter* akan dimasukkan ke APBD 2019. Dia ber alasan, Bukit Duri masuk dalam program *community action plan* (CAP) dan belum dipastikan apakah warga akan dibangun kampung padat atau kampung susun. "Hasil CAP itu akan menentukan anggarannya," ujar dia.

Kuasa hukum warga Bukit Duri, Vera Wenny Soemarwi, kecewa atas penghapusan anggaran tersebut. Menurut dia, DKI wajib menyediakan hunian sementara (*shelter*) sampai ada hunian permanen bagi 93 lahan di RW 10, 11, dan 12 yang digusur. Vera juga memastikan, pemilik lahan di Setia Ciliwung siap menjual lahannya kepada DKI. "Tapi enggak ada *political will* dari pemerintah untuk membangun *shelter*," kata dia.

Vera pun mengungkapkan upaya DKI menawarkan bantuan uang sewa karena belum bisa mem-

bangun *shelter* sampai kampung susun dibangun. "Mau enggak mau, kami iktat mekanisme bantuan biaya sewa itu."

Anggota Komisi Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Maruara Siahaan, pun mengkritik penghapusan anggaran pembangunan *shelter*. "Seharusnya dilihat dulu, apakah di sana memungkinkan pembangunan *shelter*. (Dinas Perumahan) jangan main anggarkan saja," tutur politikus PDI Perjuangan itu.

Dia berjanji akan menyoroti usul penghapusan anggaran tersebut dalam rapat Badan Anggaran. Maruara berpendapat, Dinas tak bisa seenaknya mencoret anggaran kemudian mengalihkannya ke program lain. ●

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Batalkan Anggaran Shelter Warga Bukit Duri

DKI untuk Bukit Duri

Warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang memenangi gugatan *class action* terhadap pemerintah DKI Jakarta, dikabarkan belum menerima bantuan uang sewa yang dijanjikan. Bantuan tadi diberikan sambil menunggu kampung susun berduri. Tak hanya itu, menurut pengacara warga Bukit Duri, Vera Wenny Soemanwi, itu juga merupakan kompensasi karena pemerintah tak bisa membangun *shelter*.

Kronologi gugatan warga Bukit Duri dan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah DKI:



Warga Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, saat sidang gugatan *class action* di PN Jakarta Pusat, 2 Agustus 2016.

28 September 2016

Salpol PP membongkar rumah warga Bukit Duri.

10 Mei 2016

Warga Bukit Duri mengajukan gugatan *class action* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar rumah dan tanah yang telah digusur diganti dengan rumah dan tanah pula, bukan dengan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

25 Oktober 2017

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan *class action* warga Bukit Duri.

28 Mei 2018

Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding Balaf Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.

Yang telah dilakukan Gubernur Anies Baswedan:

1. Tidak melanjutkan banding atas gugatan *class action* warga Bukit Duri.
2. Membentuk tim *community action plan* untuk pembangunan kampung susun Bukit Duri berbasis koperasi warga berdaya.
3. Meminjau lahan untuk kampung susun di Setia Ciliwung, Bukit Duri.
4. Merawakan solusi bantuan uang sewa karena anggaran pembangunan *shelter* dalam APBD 2018 dibatalkan.